

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya diperuntukan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang memerlukan. Akuntansi telah berkembang seiring dengan perkembangan dunia pemerintahan.

Seiring dengan adanya tuntutan akan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya pengaturan baru dari masyarakat kearah yang lebih baik (*New Public Management*), dengan tiga prinsip utamanya yaitu profesional, transparansi dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penilaian sampai dimana keberhasilan dan tingkat kemajuan dari sebuah sistem kerja pemerintahan akan terlihat berhasil atau tidak dan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau belum (Azmi & Jusmani, 2017).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Ulfa (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai

tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut mampu mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang diterapkan. Kemudian untuk efisiensi, dalam penelitiannya Ulfa (2018) berpendapat bahwa efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan. Efisiensi kinerja sektor publik lebih bersifat relatif.

Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang (Munandar, 2015). Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) (Mardiasmo, 2018).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah

(Anfujatin, 2016). Rasio pada realisasi terhadap anggaran membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan didalam APBD.

Anggaran belanja daerah merupakan instrumen penting dalam menjalankan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat ditingkat lokal. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memainkan sentral dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran belanja daerah. Namun dalam praktiknya, pada anggaran belanja daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Masalah seperti pemborosan anggaran, kurangnya akuntabilitas, kekurangan pengawasan yang memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat sering kali menjadi fakta penghambatan dalam mencapai efektivitas anggaran belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga (Maga et al, 2016).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas urusan penunjang perencanaan yang diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016. Tercatat di laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 21.947.263.370 atau 84,75% dari pagu sebesar Rp. 25.896.714.761. Adapun penyerapan anggaran diantaranya ada realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar 7.677.581.892,00 atau setara 97,11% dari total anggaran belanja tidak langsung tahun 2019. Namun dengan besarnya angka persentase penyerapan anggaran yang ada tidak ditemukan laporan yang membahas kemana saja anggaran yang diserap tadi digunakan. Fenomena-fenomena yang terjadi terkait pos belanja tidak langsung menjadi permasalahan dari tahun ke tahun yang hingga kini masih di pertanyakan karena besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pos belanja terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung telah efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengetahui Apa saja kendala pelaksanaan anggaran belanja pada badan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja langsung pada badan perencanaan pembangunan daerah?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung pada badan perencanaan pembangunan daerah?

3. Apa saja kendala pelaksanaan anggaran belanja langsung pada badan perencanaan pembangunan daerah?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tingkat efektivitas anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun anggaran 2019 hingga 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa:

1. Untuk menganalisa efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Untuk menganalisa efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan anggaran belanja langsung pada badan perencanaan pembangunan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai implementasi efektivitas pada anggaran belanja daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis.
2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis, hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai efektivitas dampak pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung yang dilakukan pada badan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkalis.

3. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai hubungan sejenis dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara teratur dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah pembahasan dan pembaca memahami garis besar penelitian ini. Adapun sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN